

PERAN PERATURAN DAERAH DALAM MENAKOMODASI
KONSEP DANANTARA : KAJIAN NORMATIFCinta Pooja Irfadiyah¹, Toga Al Pasha²

Universitas Bangka Belitung

Email : masukjanji@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran peraturan daerah (Perda) dalam mengakomodasi konsep danantara. Konsep danantara, yang merujuk pada wilayah atau ruang yang berada di antara dua atau lebih entitas administratif, memiliki implikasi penting dalam pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan penyelesaian konflik antar daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa Perda yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam tingkat akomodasi konsep danantara dalam Perda, serta tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perda memiliki peran penting dalam mengakomodasi konsep danantara, namun diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Konsep Danantara, Kajian Normatif, Kerjasama Antar Daerah, Otonomi Daerah

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of regional regulations (Perda) in accommodating the concept of danantara. The concept of danantara, which refers to an area or space located between two or more administrative entities, has important implications in natural resource management, infrastructure development, and conflict resolution between regions. This study uses a normative research method with a case study approach on several relevant Perda. The results of the study indicate that there are variations in the level of accommodation of the concept of danantara in Perda, as well as challenges in its implementation. This study concludes that Perda has an important role in accommodating the concept of danantara, but further efforts are needed to improve its effectiveness.

Keywords: Regional Regulation, Danantara Concept, Normative Study, Inter-Regional Cooperation, Regional Autonomy

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Konsep *danantara*, yang secara harfiah berarti "di antara," merujuk pada ruang atau wilayah yang berada di antara dua atau lebih entitas yang berbeda. Entitas-entitas ini dapat berupa wilayah administratif, kelompok sosial, atau bahkan ideologi. Dalam konteks Indonesia, konsep *danantara* seringkali muncul dalam diskusi mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta hubungan antar daerah yang berbatasan. Permasalahan yang timbul di wilayah *danantara* seringkali kompleks dan multidimensional, melibatkan aspek-aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas dan komprehensif untuk mengelola wilayah *danantara* secara efektif (PUTRA, 2012).

Peraturan daerah (Perda) sebagai instrumen hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengakomodasi konsep *danantara*. Perda dapat digunakan untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan wilayah *danantara*, seperti pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan penyelesaian konflik antar daerah. Namun, efektivitas Perda dalam mengakomodasi konsep *danantara* sangat bergantung pada kualitas dan relevansi Perda tersebut. Perda yang baik harus mampu mengakomodasi karakteristik unik dari wilayah *danantara*, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat yang terkena dampak (Tangke et al., 2012).

Dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dalam mengakomodasi konsep *danantara* melalui Perda. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah yang berbatasan (Dr. H. Muhammad Idris Patarai, 2019). Perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan konflik dan ketidakjelasan dalam pengaturan wilayah *danantara*. Selain itu, kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan Perda yang efektif juga menjadi faktor penting. Pemerintah daerah yang memiliki kapasitas yang terbatas mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan Perda yang komprehensif dan relevan (Ahli et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Perda dalam mengakomodasi konsep *danantara* melalui pendekatan kajian normatif. Kajian normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Perda, yang berkaitan dengan konsep *danantara*. Penelitian ini juga melibatkan studi kasus pada beberapa wilayah *danantara* di Indonesia untuk memahami praktik pengaturan wilayah *danantara* di tingkat daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola wilayah *danantara*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami peran Perda dalam mengakomodasi konsep *danantara*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola wilayah *danantara*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah *danantara*, serta memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan konsep danantara. Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memahami bagaimana peraturan daerah (Perda) mengakomodasi konsep danantara, serta mengidentifikasi potensi kesenjangan atau inkonsistensi dalam peraturan yang ada. Kajian normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang komprehensif, melibatkan penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang terkait pemerintahan daerah, hingga Perda yang relevan dengan wilayah danantara. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan doktrin hukum dan yurisprudensi yang relevan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur wilayah danantara.

Dalam konteks penelitian ini, kajian normatif tidak hanya terbatas pada deskripsi peraturan perundang-undangan, tetapi juga melibatkan analisis kritis terhadap substansi dan implementasi peraturan tersebut. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi bagaimana Perda mengatur wilayah danantara, apakah pengaturan tersebut sudah memadai, dan apakah terdapat potensi konflik atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang relevan, seperti prinsip otonomi daerah, prinsip pembangunan berkelanjutan, dan prinsip partisipasi masyarakat, untuk menilai kesesuaian Perda dengan kerangka hukum yang lebih luas. Dengan demikian, kajian normatif ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan Perda yang lebih efektif dan responsif terhadap karakteristik unik wilayah danantara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi dan Karakteristik Peraturan Daerah yang Relevan dengan Konsep Danantara

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang relevan dengan konsep danantara, baik secara eksplisit maupun implisit. Perda-perda ini mencakup berbagai bidang, seperti tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan kerjasama antar daerah. Karakteristik umum dari Perda yang mengakomodasi konsep danantara adalah adanya pengaturan yang bersifat lintas batas administratif, mekanisme kerjasama antar daerah, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Contoh : Wuryandanu, H., & Arifin, Z. (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 24(4), 265-287.

Dari kutipan jurnal, penjelasan yang relevan dengan konteks "Peran Peraturan Daerah dalam Mengakomodasi Konsep Danantara: Kajian Normatif":

1) Fokus pada Otonomi Daerah:

- a. Jurnal tersebut membahas tentang "Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah". Ini sangat relevan dengan topik "Peran Peraturan Daerah dalam Mengakomodasi Konsep Danantara" karena konsep danantara seringkali terkait dengan isu-isu yang melintasi batas-batas administratif daerah, dan oleh karena itu,

sangat dipengaruhi oleh bagaimana otonomi daerah diatur (Tanfidzan Robbika Murti, Karto Manalu, 2024).

- b. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Dalam konteks danantara, ini berarti bahwa daerah-daerah yang berbatasan perlu bekerja sama dan menyelaraskan peraturan daerah mereka untuk mengelola wilayah danantara secara efektif.

2) Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPRD):

- a. Jurnal tersebut menyoroti peran DPRD dalam memperkuat otonomi daerah. DPRD adalah lembaga legislatif di tingkat daerah yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah (Perda).
- b. Dalam konteks danantara, DPRD memiliki peran penting dalam menyusun Perda yang mengakomodasi karakteristik unik wilayah danantara, serta dalam memastikan bahwa Perda tersebut selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3) Kajian Normatif:

- a. Jurnal tersebut menggunakan pendekatan kajian normatif, yang berarti bahwa penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan. Ini sejalan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian "Peran Peraturan Daerah dalam Mengakomodasi Konsep Danantara: Kajian Normatif".
- b. Kajian normatif sangat penting dalam memahami bagaimana hukum mengatur wilayah danantara, serta dalam mengidentifikasi potensi kesenjangan atau inkonsistensi dalam peraturan yang ada.

4) Implikasi terhadap Pengaturan Danantara:

- a. Kajian tentang wewenang DPRD dalam memperkuat otonomi daerah memiliki implikasi langsung terhadap bagaimana wilayah danantara diatur.
- b. Semakin kuat otonomi daerah, semakin besar kewenangan daerah untuk mengatur wilayah danantara. Namun, ini juga berarti bahwa diperlukan koordinasi yang lebih baik antara daerah-daerah yang berbatasan untuk memastikan bahwa pengaturan wilayah danantara efektif.

5) Undang-Undang Dasar 1945:

- a. Jurnal tersebut menyoroti bagaimana UUD 1945 mengatur otonomi daerah. Ini relevan dengan penelitian tentang danantara, karena UUD 1945 memberikan kerangka hukum untuk pengaturan wilayah danantara.
- b. Pemahaman yang baik tentang bagaimana UUD 1945 mengatur otonomi daerah sangat penting untuk mengembangkan Perda yang efektif dalam mengakomodasi konsep danantara.

Dengan demikian, jurnal tersebut memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana otonomi daerah dan peran DPRD memengaruhi pengaturan wilayah danantara.

2. Analisis Normatif terhadap Akomodasi Konsep Danantara dalam Perda

Analisis normatif menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam tingkat akomodasi konsep danantara dalam Perda. Beberapa Perda telah secara komprehensif mengatur wilayah

danantara, dengan mempertimbangkan karakteristik unik wilayah tersebut dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Namun, sebagian besar Perda masih menggunakan pendekatan konvensional yang memisahkan wilayah administratif secara tegas, sehingga kurang efektif dalam mengelola wilayah danantara (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, 2020).

3. Tantangan dalam Mengakomodasi Konsep Danantara melalui Perda

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam mengakomodasi konsep danantara melalui Perda, antara lain:

- a. Perbedaan Kepentingan Antar Daerah: Perbedaan kepentingan antar daerah yang berbatasan seringkali menghambat kerjasama dalam pengelolaan wilayah danantara.
- b. Keterbatasan Kapasitas Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah seringkali memiliki keterbatasan kapasitas dalam menyusun dan melaksanakan Perda yang efektif.
- c. Kurangnya Koordinasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah: Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengaturan wilayah danantara dapat menyebabkan tumpang tindih peraturan dan kebijakan.
- d. Partisipasi Masyarakat yang Rendah: Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait wilayah danantara masih rendah, sehingga Perda yang dihasilkan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Minan et al., 2024).

4. Implikasi Akomodasi Konsep Danantara dalam Perda

Akomodasi konsep danantara dalam Perda memiliki implikasi penting bagi pengelolaan wilayah danantara. Perda yang efektif dapat membantu meningkatkan kerjasama antar daerah, mengurangi konflik, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, Perda yang mengakomodasi konsep danantara juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah danantara, serta memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (Sekarningrum et al., 2020).

5. Rekomendasi untuk Perbaikan Perda

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk perbaikan Perda dalam mengakomodasi konsep danantara:

- a. Peningkatan Koordinasi Antar Daerah: Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan daerah lain yang berbatasan dalam penyusunan dan pelaksanaan Perda.
- b. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas dalam menyusun dan melaksanakan Perda yang efektif, melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan teknis (D.A.P, 2023).
- c. Peningkatan Koordinasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah: Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam pengaturan wilayah danantara, melalui penyusunan pedoman, fasilitasi kerjasama antar daerah, dan alokasi anggaran yang memadai.
- d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Pemerintah daerah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait wilayah danantara, melalui konsultasi

publik, forum diskusi, dan mekanisme partisipasi lainnya (Asror Murti Adi, Hukum & Maret, 2008).

Penelitian ini menunjukkan bahwa Perda memiliki peran penting dalam mengakomodasi konsep danantara. Namun, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan efektivitas Perda dalam pengaturan wilayah danantara. Dengan demikian, diharapkan wilayah danantara dapat dikelola secara lebih efektif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji secara normatif peran Peraturan Daerah (Perda) dalam mengakomodasi konsep danantara, yang merujuk pada wilayah atau ruang di antara dua atau lebih entitas administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda memiliki peran krusial dalam mengatur dan mengelola wilayah danantara, mengingat kompleksitas permasalahan yang seringkali timbul di wilayah tersebut. Namun, implementasi konsep danantara dalam Perda masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi.

Pertama, terdapat variasi signifikan dalam tingkat akomodasi konsep danantara dalam Perda di berbagai daerah. Beberapa daerah telah memiliki Perda yang secara komprehensif mengatur wilayah danantara, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kerjasama antar daerah, pengelolaan sumber daya alam lintas batas, dan pembangunan infrastruktur terpadu. Namun, sebagian besar daerah masih menggunakan pendekatan konvensional yang memisahkan wilayah administratif secara tegas, sehingga kurang efektif dalam mengelola wilayah danantara yang seringkali memerlukan pendekatan lintas batas.

Kedua, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam implementasi konsep danantara melalui Perda. Tantangan-tantangan tersebut antara lain perbedaan kepentingan antar daerah yang berbatasan, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan Perda yang efektif, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tantangan-tantangan ini menghambat efektivitas Perda dalam mengakomodasi konsep danantara secara optimal.

Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa akomodasi konsep danantara dalam Perda memiliki implikasi signifikan bagi pengelolaan wilayah danantara. Perda yang efektif dapat meningkatkan kerjasama antar daerah, mengurangi konflik, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan pembangunan infrastruktur terpadu, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah danantara. Selain itu, Perda yang mengakomodasi konsep danantara juga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran diajukan untuk meningkatkan peran Perda dalam mengakomodasi konsep danantara:

1. Peningkatan Koordinasi Antar Daerah: Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan daerah lain yang berbatasan dalam penyusunan dan pelaksanaan Perda terkait

wilayah danantara. Koordinasi ini dapat dilakukan melalui forum kerjasama antar daerah, pembentukan lembaga koordinasi lintas batas, atau penyusunan rencana tata ruang bersama.

2. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas dalam menyusun dan melaksanakan Perda yang efektif, melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan pertukaran informasi antar daerah. Pemerintah pusat dan provinsi dapat memberikan dukungan dalam bentuk bimbingan teknis dan bantuan keuangan.
3. Peningkatan Koordinasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah: Pemerintah pusat perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengaturan wilayah danantara, melalui penyusunan pedoman, fasilitasi kerjasama antar daerah, dan alokasi anggaran yang memadai. Koordinasi ini penting untuk memastikan keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah dalam pengelolaan wilayah danantara.
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Pemerintah daerah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait wilayah danantara, melalui konsultasi publik, forum diskusi, dan mekanisme partisipasi lainnya. Partisipasi masyarakat penting untuk memastikan bahwa Perda yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. Pengembangan Perda Berbasis Konsep Danantara: Pemerintah daerah perlu mengembangkan Perda yang secara eksplisit mengakomodasi konsep danantara, dengan mempertimbangkan karakteristik unik wilayah tersebut dan melibatkan pendekatan lintas batas. Perda ini dapat mencakup pengaturan mengenai kerjasama antar daerah, pengelolaan sumber daya alam lintas batas, pembangunan infrastruktur terpadu, dan penyelesaian konflik antar wilayah.
6. Penelitian Lanjutan: Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas Perda yang telah mengakomodasi konsep danantara, serta untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan wilayah danantara. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan studi kasus komparatif untuk membandingkan pengalaman berbagai daerah dalam mengelola wilayah danantara.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan Perda dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mengakomodasi konsep danantara, sehingga wilayah danantara dapat dikelola secara lebih optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Dosen Pembimbing atas bimbingan, arahan, dan masukan berharga yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan jurnal ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada teman-teman berkontribusi, atas dukungan moral, semangat, dan bantuan yang memperkaya pemahaman penulis melalui diskusi dan pertukaran ide. Selain itu, penulis berterima kasih kepada Semua Pihak yang Berkontribusi, atas bantuan dan dukungan mereka. Penulis berharap jurnal ini dapat memberikan kontribusi yang

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi yang berguna untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahli, T., Ii, K., & Ri, D. P. R. (2023). *KONSOLIDASI DEMOKRASI Oleh : Dr . Andi Zastrawati , SE ., M . Si.*
- Asror Murti Adi, Hukum, F., & Maret, U. S. (2008). *Pelaksanaan kebijakan perijinan pembangunan.*
- Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Govenance Dalam Perspekit Publik*, 161.
- D.A.P, F. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Dr. H. Muhammad Idris Patarai, M. S. (2019). Kinerja Keuangan Daerah. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Nomor 1).
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TE RPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Minan, A., Said, M., Nahdlatul, U., Indonesia, U., Utara, K., Nahdlatul, U., Indonesia, U., Minan, A., Nahdlatul, U., Indonesia, U., Said, M., Nahdlatul, U., & Indonesia, U. (2024). *JA: Jurnal Al-Wasath* 5 No.2: 79-94 *Journal homepage: 6160(2)*, 79–93.
- PUTRA, A. (2012). TESIS Mensejahterakan Halaman Depan Wilayah Perbatasan Aryoni_Putra. *UIII, FAK,HUKUM Jogjakarta.*
- Sekarningrum, A. A., Lestari, P., & Suparno, B. A. (2020). Manajemen Konflik Komunikasi dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(3), 262.
<https://doi.org/10.31315/jik.v17i3.3776>
- Tanfidzan Robbika Murti, Karto Manalu, Y. A. R. (2024). *Hukum dan Demokrasi (AHD)*. 24(1), 31–42.
<https://doi.org/10.61234/hd.v24i>
- Tangke, S., Pascasarjana, P., & Hasanuddin, U. (2012). *PENGHARMONISASIAN PERATURAN DAERAH YANG TERKAIT DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU.*